



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

NOTULENSI FGD RENCANA PENGEMBANGAN EITI DAERAH

TEMPAT : HOTEL ASTON
 : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.7 BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
HARI DAN TANGGAL : RABU, 12 APRIL 2017
WAKTU : JAM 09.00 – SELESAI
AGENDA : RENCANA PENGEMBANGAN EITI DAERAH
PESERTA YANG HADIR :

Asisten Sekretaris Daerah
Prov. Kalimantan Timur
BAPENDA, Dinas ESDM
Prov. Kalimantan Timur

BAPENDA, Kukar
Prov. Kalimantan Timur
Dinas ESDM
Prov. Kalimantan Timur

Disperindakom & UKM
Prov. Kalimantan Timur
Dinas Lingkungan Hidup
Prov. Kalimantan Timur
PT. Kaltim Prima Coal
PT. Badak NGL
PT. Total E&P
PT. MHU
PT. Tanito Harum
PT. Tambang Damai
PT. Insani Baraperkasa

PT. Indexim Coalindo
Sekretariat EITI & Kemenko
Perekonomian

H. Ichwansyah

Djoni Topan
Bambang Eryanto
Mulia Fardani
Syafruddin Nur
Bayu Aji P
M. Yansyar

Edward
Taufik Hidayat
Nazran
Puji Herjanto
Afkar

K. Baihaki

Hendrawan

Fauzan Rida
Hans Utama
Reimon
Jasmur Chaniago

Dedy Natalia
Rifkiansyah
Christine

Leo

Rio

Reno Barus
Ahmad Bastian Halim
Agus Haryanto
Dadang

Parjo
Saiful Mujab
Rosiana
Edi Effendi T
Ronald Tambunan
Venta Adrian
Arief
Anggi Gartika
Eka
Astari
Agus Prasetyono

A. PEMBUKAAN

Rapat Rencana Pembentukan EITI Daerah dipimpin oleh Bapak Ahmad Bastian Halim dan dilanjutkan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian & Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ichwansyah, dengan menyampaikan point-point agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Sambutan dari Bapak Ahmad Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif:

Maksud dan tujuan rencana pembentukan EITI Daerah ini yaitu mengupayakan dengan terlaksanannya agenda atau program Sekretariat EITI sesuai dengan kaedah-kaedah transparansi standar EITI yang telah sepakat bergabung pada tahun 2010. Serta untuk mengupayakan tata kelola Industri Ekstraktif ini bermanfaat dan transparan bagi masyarakat. Selain itu juga dalam standar EITI Beneficial Ownership dengan tujuan mengetahui kepemilikan perusahaan pertambangan yang ada di Minerba dan Migas. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan Provinsi Kalimantan Timur salah satu pelopor adanya Pembentukan EITI Daerah. Selain itu ada hal-hal yang bersifat rahasia seperti keterbukaan informasi publik pun kita upayakan dibuka walaupun tidak semuanya. Selain itu juga dengan adanya rencana pembentukan EITI daerah ini yaitu untuk membantu apakah sumber daya alam yang dikelola di daerah apakah sudah betul mendapatkan penerimaan negara yang sesuai dengan dana bagi hasil yang diberikan dari pemerintah atau belum.

2. Sambutan dari Bapak Ichwansyah, Asisten 2 Sekda Provinsi Kaltim:

Terima kasih atas waktunya, dengan adanya inisiasi transparansi ini sangat mendukung sekali untuk pemerintah daerah, tidak dipungkiri lagi pada era seperti ini keterbukaan transparansi sudah hal yang tidak bisa di tutupi lagi, karena sumber daya alam ini sudah banyak orang tahu dan mengenal. Dengan adanya Inisiasi EITI Daerah ini yaitu saling bersinergi dan saling keterbukaan minimal dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2018 ini mendapatkan Permen 37 mendapatkan bagi hasil 10%, bahwa akan hal itu juga Provinsi Riau dan Kalimantan Timur ini juga adalah penyumbang penerimaan Negara ke Pemerintah. Dengan sebagai Kalimantan Timur ini sebagai pelopor, kami menyambut baik akan hal ini, dan siap sebagai pilot EITI Daerah.

B. PEMAPARAN

Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, selaku Tim Leader EITI. Menyampaikan rencana pembentukan EITI Daerah, dengan point-point sebagai berikut:

- Terima kasih atas undangan kehadiran Bapak/Ibu dalam FGD ini, sekaligus meminta masukan dan kesepakatan untuk rencana pembentukan/pengembangan EITI Daerah.
- Pemaparan tentang pendahuluan tentang definisi EITI secara global dengan tujuan dan pelaksanaannya
- Pemaparan Pembentukan Tim Transparansi Indonesia sesuai Perpres 26/2010 dengan adanya Tim Pengarah dan Tim Pelaksanaan
- Pemaparan tentang perkembangan EITI di Indonesia
- Pemaparan mekanisme kerja penyusunan Laporan EITI, sesuai standar internasional
- Menjelaskan manfaat dari Laporan EITI
- Pemaparan pelaksanaan EITI Daerah, dengan *me-review* pelaksanaan di daerah dan dasar hukum pengembangan EITI daerah sesuai dengan EITI standar 2016
- Penjelasan tujuan pengembangan EITI daerah serta ruang lingkup dan stakeholder daerah yang berperan untuk pengembangan EITI Daerah
- Penjelasan hubungan antara EITI Nasional dengan Daerah, serta acuan kegiatan dan tata kelola pembentukan EITI daerah
- Penjelasan penerapan standar EITI sebagai acuan EITI Daerah dengan persyaratan (requirements) dari 1-8
- Langkah tindak lanjut pembentukan dan pengembangan EITI Daerah.

C. PEMBAHASAN, TANGGAPAN DAN MASUKAN

Point-point mengenai pembahasan, tanggapan dan masukan dari para peserta Forum Diskusi Terfokus (FGD) Pembentukan EITI Daerah, terangkum sebagai berikut :

1. Masukan dan Pertanyaan dari Pak Djoni Topan, Bappeda Dinas ESDM

- Inisiasi pembentukan EITI daerah ini harus dimulai dari sektor Minerba seperti perijinan IUP yang non C&C. Namun untuk perijinan PKP2B sebaiknya hanya fokus di Pemerintah Pusat
- Bagaimana Kewenangan untuk Pemda jika dilakukannya EITI Daerah ini?
- Saat ini data Royalti dan seluruh pengeluaran perusahaan diperoleh di Distamben
- Dengan pembentukan EITI Daerah ini, stakeholder yang ada di daerah sangat membantu sekali dalam industri ekstraktif dan bermanfaat bagi daerah
- Perlu ditambahkan dalam struktur organisasi EITI daerah yaitu; Biro Infrastruktur & Sumber Daya Alam, Biro Ekonomi, dan BPKAD
- Dalam hal ini perlu penguatannya sumber dan UU yang ada di Kementerian ESDM akan adanya EITI Daerah ini
- Pemda dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki data dan dokumen RKTTLAB (Rencana Kerja Tahunan Teknis Lingkungan dan Anggaran Biaya) yang dikelola

oleh pengolahan data dan tim evaluator dari Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan UU No.23 tahun 2014.

2. Masukan dari Pak Bambang, Bappeda Dinas ESDM

- Dengan rencana pembentukan EITI Daerah ini diharapkan adanya aturan/regulasi yang tegas untuk mendukung EITI Daerah untuk wilayah daerah, karena adanya kendala dalam permintaan data dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan adanya sinkronisasi data antara Nasional dan Subnasional
- Diharapkan dengan adanya rencana pembentukan EITI daerah ini dilakukan secara kontinu/permanen, serta adanya sumber dana/anggaran untuk pelaksanaan EITI Daerah di wilayah daerah
- Di Pemda Provinsi Kalimantan timur ini sudah menerapkan sistem RKTTLAB, tetapi masih banyak kekurangan dalam sisi perijinan dan data
- Karena EITI sifatnya keterbukaan data, maka perlu payung hukum dan dokumen yang mendukung
- Data tentang eksplorasi dan eksploitasi di sektor migas terkait data lifting migas yang tidak realtime sehingga Pemda Kaltim sulit mengakses data, bahkan website untuk mengakses datanya saat itu sudah tidak ada lagi.

3. Masukan dari Pak Taufik Hidayat, Bapenda KUKAR – Kaltim

- Wilayah Kutai Kartanegara adalah penyumbang terbesar dari sektor Minyak dan Gas
- Bapenda Kukar menyambut baik rencana pembentukan EITI Daerah

4. Masukan Pak Baehaki, Disperindakom dan UKM Kaltim

- Perangkat daerah sangat mendukung dengan rencana pembentukan dan pengembangan EITI Daerah, yang saat ini perindustrian pertambangan juga didukung oleh UU no 3
- Daerah masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan data dari sektor industri ekstratif
- Bagaimana pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lalu bagaimana bentuk pemantauan dan teknisnya untuk perangkat daerah?

TANGGAPAN DARI PAK EDI:

- Mengenai data saat ini dipusat juga masih mengalami kesulitan karena adanya UU perpajakan dan untuk membuka data perlu mendapatkan surat otorisasi dari perusahaan
- Perlunya penetapan data yang dapat di rekonsiliasi dan data yang tidak perlu direkonsiliasi
- Banyak juga laporan data dari daerah yang menurut daerah signifikan, tetapi menurut pusat tidak signifikan
- Salah satu hambatan dan lemahnya Perpres 26 tidak memiliki punishment dan rewards. Tetapi kita bisa menyampaikan apabila tidak melaporkan: pertama akan kami sampaikan kepada Kementerian ESDM, yang kedua pemerintah daerah yang bersangkutan, yang ketiga

dan merilis nama-nama perusahaan yang tidak melapor di website EITI, dan ke empat membuat awards bagi perusahaan-perusahaan yang mau transparan

- Tentang Pendanaan, di pusat juga masih mengalami kesulitan dalam hal pendanaan.
- Selain itu, salah satu syarat dari EITI Internasional harus adanya IA (*Independent Administrator*)
- Bentuk pemantauan kembali lagi ke peraturan hukum, jadi kita menstreamingkan sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada.
- Pada hal ini terkait pembentukan EITI daerah ide ini bersifat *voluntary*, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kalimantan timur

D. KESIMPULAN

Atas masukan dan arahan yang telah disampaikan oleh daerah tentang rencana pembentukan EITI daerah ini, adapun kesimpulannya adalah:

- Menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan berkordinasi dengan perangkat daerah
- Mempersiapkan beberapa regulasi/payung hukum untuk rencana EITI daerah
- Terkait anggaran untuk rencana pengembangan EITI daerah dengan mengupayakan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk merealisasikan EITI daerah ini supaya terbentuk
- Dari Kemenko Perekonomian juga megarapkan untuk Sekretariat EITI Indonesia segera merealisasikan EITI Daerah.